

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja. Banyak pekerja rentan terjebak dalam eksploitasi akibat janji pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi yang ternyata menyesatkan. Para korban sering mengalami kekerasan, penahanan upah, dan kondisi kerja yang jauh dari harapan. Meskipun Polres Nunukan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) aktif melakukan penindakan, seperti penggerebekan rumah penampungan calon TKI ilegal dan penahanan pemberangkatan pekerja migran ilegal, permasalahan ini memerlukan strategi yang lebih komprehensif.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Salah satunya adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bertujuan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan TPPO.

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi

berbagai kendala. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan pentingnya migrasi tenaga kerja yang legal menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan yang efektif.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO harus diiringi dengan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Pemerintah perlu memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan, psikologis, dan bantuan hukum yang memadai. Kerja sama dengan negara tujuan migrasi juga penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Secara keseluruhan, penanganan kasus TPPO dan pekerja migran memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Hanya dengan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi, permasalahan ini dapat ditangani secara efektif.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek. Dua langkah strategis yang dapat diambil adalah:

### **1. Peningkatan Edukasi Masyarakat**

Sosialisasi intensif di daerah-daerah sumber pekerja migran sangat

penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur legal bekerja di luar negeri dan risiko TPPO. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan program edukasi yang menyoal calon pekerja migran, keluarga, dan masyarakat umum. Program ini dapat mencakup informasi mengenai proses perekrutan resmi, hak dan kewajiban pekerja migran, serta konsekuensi hukum dari migrasi ilegal. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan menghindari praktik perekrutan ilegal yang berpotensi menjadi korban TPPO. Sebagaimana disarankan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sosialisasi yang masif diperlukan untuk mencegah TPPO terhadap pekerja migran Indonesia.

## 2. Penguatan Pengawasan di Perbatasan

Pemerintah harus memperketat pengawasan di jalur-jalur perbatasan, terutama yang sering digunakan untuk memberangkatkan pekerja migran ilegal, dengan menambah personel dan peralatan pengawasan. Pengawasan yang ketat di perbatasan dapat mencegah penyelundupan pekerja migran ilegal dan memastikan bahwa hanya pekerja migran yang telah melalui prosedur resmi yang dapat berangkat ke luar negeri. Selain itu, kerja sama antara instansi terkait, seperti Imigrasi, Kepolisian, dan BP2MI, perlu ditingkatkan untuk koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan kasus TPPO. Implementasi kedua langkah tersebut memerlukan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Dengan

pendekatan yang komprehensif, diharapkan praktik TPPO dan migrasi ilegal dapat diminimalkan, serta perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan.

### 3. Peningkatan Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat merupakan kunci dalam pencegahan TPPO. Banyak calon pekerja migran tidak menyadari risiko yang mereka hadapi saat memilih jalur ilegal. Melalui sosialisasi yang intensif, mereka dapat memahami prosedur legal, hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, serta konsekuensi hukum dari migrasi ilegal. BP2MI telah melakukan berbagai upaya dalam hal ini, termasuk pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain itu, peran media massa dan media sosial sangat penting dalam menyebarkan informasi. Kampanye melalui platform digital dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat terkait migrasi tenaga kerja.

Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) juga dapat memperkuat upaya edukasi. NGO sering memiliki jaringan luas di komunitas lokal dan dapat membantu dalam penyuluhan serta pendampingan bagi calon pekerja migran. Dengan pendekatan yang inklusif, edukasi masyarakat dapat lebih efektif dan menyeluruh.

#### 4. Penguatan Pengawasan di Perbatasan

Pengawasan di perbatasan merupakan garis depan dalam mencegah TPPO. Pelaku sering memanfaatkan jalur-jalur perbatasan untuk memberangkatkan pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan di titik-titik rawan sangat diperlukan. Penambahan personel dan peralatan pengawasan, seperti kamera CCTV dan sistem pelacakan, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, pelatihan bagi petugas di lapangan sangat penting. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menangani kasus TPPO dengan tepat. Kerja sama dengan negara tetangga juga diperlukan, mengingat TPPO sering melibatkan lintas negara. Koordinasi yang baik dapat mempermudah penanganan kasus dan mencegah pelaku melarikan diri ke negara lain. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengawasan. Sistem informasi dan database yang terintegrasi dapat memudahkan identifikasi dan pelacakan kasus TPPO. Dengan data yang akurat, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.

#### 5. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penanganan TPPO. Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi terkait migrasi tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pembahasan mengenai penyediaan data

untuk TPPO, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan terkait TPPO di Indonesia.

BP2MI juga berperan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi pekerja migran. Mereka menyediakan layanan informasi, pelatihan, dan bantuan hukum bagi pekerja migran dan keluarganya. Dengan demikian, pekerja migran dapat terlindungi dari praktik TPPO dan mendapatkan hak-haknya secara optimal.

Kerjasama antar lembaga juga sangat penting. Polri, Imigrasi, BP2MI, dan lembaga terkait lainnya perlu berkoordinasi dalam penanganan kasus TPPO. Dengan sinergi yang baik, penanganan kasus dapat lebih efektif dan efisien.

#### 6. Peran Masyarakat dan Media

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan TPPO. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan praktik perekrutan ilegal. Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting demi kesejahteraan bersama.